

## PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI PULAU JAWA TAHUN 2017–2024

*THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON REGIONAL ECONOMIC  
GROWTH IN JAVA ISLAND 2017–2024*

Mochhans Elang Agastha<sup>1\*</sup>, Yozi Aulia Rahman<sup>2</sup>

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

\*Email: mochwanselang@students.unnes.ac.id<sup>1\*</sup>, yoziaulia@mail.unnes.ac.id<sup>2</sup>

### Abstract

Regional development disparities in Indonesia, particularly in Java Island which serves as the national economic hub, remain a major challenge in achieving inclusive economic growth. Fiscal inequality and differences in regional financial capacity require the implementation of effective fiscal decentralization policies. This study aims to examine the influence of fiscal decentralization instruments—General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Regional Own-Source Revenue—on economic growth across six provinces in Java Island during the period 2017 to 2024. The research applies a panel data regression method using the Pooled Least Square approach, with secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance. The results reveal that Regional Own-Source Revenue has a positive and significant impact on economic growth, while the Special Allocation Fund exhibits a significant negative effect. The Revenue Sharing Fund shows a negative but statistically insignificant relationship, and the General Allocation Fund has no significant impact. Simultaneously, all four fiscal variables significantly influence regional economic growth. These findings suggest that the effectiveness of fiscal decentralization depends not only on the size of the transfers but more importantly on the strategic use of funds and the institutional capacity of local governments. Strengthening local fiscal independence and reformulating transfer schemes are crucial to achieving balanced regional development.

**Keywords:** fiscal decentralization, economic growth, special allocation fund, revenue sharing fund, regional own-source revenue, general allocation fund.

### Abstrak

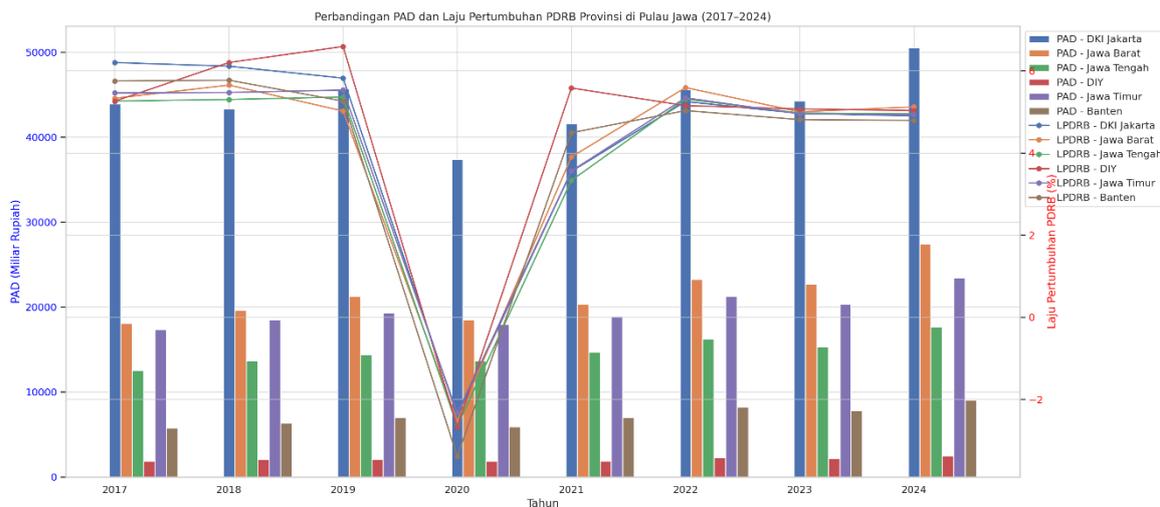
Kesenjangan pembangunan antardaerah di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa yang merupakan pusat ekonomi nasional, masih menjadi tantangan utama dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketimpangan fiskal dan perbedaan kapasitas keuangan daerah menuntut kebijakan desentralisasi fiskal yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen desentralisasi fiskal, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di enam provinsi di Pulau Jawa pada periode 2017 hingga 2024. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Pooled Least Square menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Khusus justru memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sementara Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel fiskal tersebut bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh kualitas pemanfaatan dana dan kapasitas kelembagaan daerah, bukan sekadar jumlah transfer yang diterima. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian fiskal daerah dan reformulasi kebijakan transfer pusat menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

**Kata kunci:** Desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, DBH.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan cita-cita utama pembangunan nasional. Namun, kenyataannya hingga kini masih terdapat kesenjangan antarwilayah, terutama antara Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi dan wilayah lainnya. Bahkan di dalam Pulau Jawa sendiri, disparitas antardaerah masih nyata, terlihat dari perbedaan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kapasitas fiskal masing-masing provinsi.

Ketimpangan pembangunan antarprovinsi di Pulau Jawa masih menjadi persoalan struktural yang belum sepenuhnya teratasi, meskipun Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan industri nasional. Data menunjukkan bahwa kontribusi Jawa terhadap PDB nasional lebih dari 58%, tetapi pemerataan kesejahteraan dan kapasitas fiskal antardaerah di dalamnya belum proporsional. Perbedaan tingkat laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kapasitas fiskal, serta kinerja belanja pemerintah daerah menggambarkan adanya disparitas antarwilayah yang berpotensi semakin melebar jika tidak diintervensi dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang tepat sasaran (Kusuma 2016; Priyono and Handayani 2021)



**Grafik 1.** Tren PDRB dan PAD Pulau Jawa 2017-2024

Sumber: BPS (2025) dan DJKP Kemenkeu (2025)

Grafik di atas menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi (laju PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kapita pada enam provinsi di Pulau Jawa. Terdapat pola yang cukup mencolok antara provinsi yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. DKI Jakarta secara konsisten mencatat PAD per kapita tertinggi sepanjang periode 2017–2024, meskipun laju PDRB sempat menurun drastis pada tahun 2020 akibat pandemi. Demikian pula Jawa Timur dan Jawa Barat menunjukkan tingkat PAD yang cukup besar, sejalan dengan pertumbuhannya yang mulai pulih sejak 2021. Sebaliknya, DIY memiliki PAD per kapita terendah, walaupun laju pertumbuhan ekonominya relatif tinggi di beberapa tahun, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas fiskal dan pencapaian output ekonomi.

Sementara itu, Banten menampilkan tren unik: PAD per kapitanya tumbuh pesat sejak 2021 meskipun laju PDRB relatif moderat. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penguatan PAD melalui sektor-sektor unggulan, seperti industri dan perdagangan, dapat menjadi pendorong fiskal alternatif. Grafik ini menegaskan pentingnya desain kebijakan desentralisasi fiskal yang memperhatikan kapasitas fiskal aktual daerah, bukan semata distribusi merata instrumen pusat seperti DAU atau DAK.

Dalam konteks ketimpangan, strategi utama yang diterapkan sejak era reformasi adalah desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan keuangan dari pusat ke daerah melalui instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip subsidiarity dan teori Tiebout, yang menekankan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih mengetahui kebutuhan lokal dan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien (Lestari 2016).

Namun demikian, efektivitas desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, integritas pengelolaan keuangan, serta konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran daerah (Kusuma 2016). Beberapa studi menunjukkan hasil yang variatif, seperti temuan di Riau bahwa hanya DAU yang memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara DAK, DBH, dan PAD tidak memberikan dampak yang jelas (Kumalasari 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua instrumen fiskal memiliki dampak yang seragam di setiap daerah.

Di luar konteks Indonesia, penelitian lintas negara membuktikan bahwa desentralisasi fiskal dapat menimbulkan efek negatif jika tidak disertai penguatan institusi lokal dan akuntabilitas fiskal (Suprianik 2023). Pemerintah Indonesia pun mencoba mereformasi kebijakan fiskal melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yang menekankan penguatan transfer berbasis kinerja dan output pembangunan, bukan semata alokasi berdasarkan variabel formula dasar.

Terdapat pula kekhawatiran bahwa ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat dapat menghambat kreativitas daerah dalam menggali PAD. Beberapa daerah dengan rasio ketergantungan lebih tinggi menunjukkan rendahnya belanja produktif serta minimnya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi local (Priyono and Handayani 2021). Di sisi lain, studi kasus di Banten menunjukkan bahwa transfer fiskal yang digunakan untuk sektor infrastruktur dan pendidikan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap produktivitas daerah dan peningkatan IPM (Kusuma 2016).

Karakteristik Pulau Jawa yang sangat heterogen, mulai dari infrastruktur, struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, hingga kapasitas fiskal, menjadikan kebijakan fiskal satu arah menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data dan kinerja sangat diperlukan untuk mengevaluasi instrumen desentralisasi fiskal. Studi empiris di Jawa Barat dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa DAU memiliki efek lebih konsisten terhadap pertumbuhan ketika dipadukan dengan indikator pembangunan manusia atau kapasitas pengelolaan fiskal daerah (Hambani and Saepul Anwar 2021; Kumalasari 2025).

Berdasarkan kerangka konseptual dan bukti-bukti empiris tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen desentralisasi fiskal berupa DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di enam provinsi di Pulau Jawa pada periode 2017–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah serta menyusun rekomendasi berbasis kinerja yang mampu mendorong pemerataan ekonomi regional di masa depan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memungkinkan daerah mengelola sumber daya fiskalnya secara mandiri. Proses ini mencakup aspek belanja, penerimaan, serta pengalokasian dana transfer dari pusat ke daerah. Konsep ini tidak hanya merupakan instrumen administratif, tetapi juga kebijakan ekonomi yang strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal. (Fisher 2023) menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal erat kaitannya dengan peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan pelimpahan kewenangan fiskal ini, daerah diharapkan dapat menyesuaikan pengeluaran publik sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masing-masing, serta mengurangi ketergantungan terhadap pusat.

Salah satu elemen penting dari desentralisasi fiskal adalah Dana Bagi Hasil (DBH), yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) dan diberikan kepada daerah atas dasar kontribusinya terhadap penerimaan negara, seperti dari sektor pajak maupun sumber daya alam. DBH diharapkan dapat memperkuat keadilan fiskal serta mendukung pembangunan daerah penghasil agar tidak tertinggal dalam hal infrastruktur dan layanan publik. Menurut Kurniawaty, Abubakar, and Akyas (2022), DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan memberikan keadilan bagi daerah penghasil. Hal ini menegaskan bahwa DBH tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki distribusi fiskal secara nasional.

Wahyudin (2020) menyatakan bahwa DBH memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki basis produksi strategis. Dalam penelitian Appirachman, Suwardi, and Ilman (2017), ditemukan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap inflasi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan DBH dapat memicu pertumbuhan permintaan dan aktivitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa peningkatan DBH akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di wilayah Pulau Jawa yang menjadi pusat produksi dan konsumsi nasional.

Selanjutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk transfer fiskal dari pusat ke daerah yang bersifat tidak terikat (*block grant*), yang bertujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antardaerah. DAU sangat penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, terutama untuk membiayai belanja operasional dan pelayanan dasar. Menurut Kurniawan (2022), TKD termasuk DAU diberikan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Wulandari and Iryanie (2024) mengungkapkan bahwa TKD diberikan sebagai bentuk respons atas ketimpangan fiskal antarwilayah, dan DAU menjadi komponen utama dalam mencapai tujuan tersebut. Mereka menyatakan bahwa dana ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan mendukung pemerataan pembangunan nasional. Wahyudin (2020) menambahkan bahwa DAU berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan pelayanan publik. Dengan fleksibilitas penggunaannya, DAU dapat digunakan untuk berbagai belanja prioritas yang mendorong produktivitas daerah. Dalam konteks makroekonomi, Appirachman, Suwardi, and Ilman (2017) menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif terhadap inflasi, yang berarti transfer ini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi. Maka dari itu, keberadaan DAU diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kapasitas pembiayaan publik di daerah.

Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan spesifik, yakni membiayai kegiatan tertentu yang merupakan prioritas nasional namun pelaksanaannya berada di tingkat daerah. DAK bersifat earmarked, artinya penggunaannya telah ditentukan dan hanya bisa dipakai untuk tujuan tertentu seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kurniawan (2022) menyebutkan bahwa DAK merupakan bagian dari TKD yang penting dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional di daerah.

Pasaribu (2025) menjelaskan bahwa transfer fiskal seperti DAK juga dimaksudkan untuk menjamin tersedianya pelayanan publik dengan standar minimum di setiap daerah. Dukungan dana ini sangat krusial dalam mempersempit kesenjangan pelayanan antardaerah. Fahira (2021) menyatakan bahwa pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana tambahan yang dapat digunakan untuk operasional dan pengembangan daerah. Dalam konteks ini, DAK menjadi alat fiskal strategis dalam pemerataan pembangunan sektoral. Dalam temuan empiris Appirachman, Suwardi, and Ilman (2017), DAK justru berpengaruh negatif terhadap inflasi, yang menandakan bahwa penggunaan dana ini cenderung lebih produktif dan tidak menimbulkan tekanan harga. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa DAK berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor-sektor strategis tanpa memicu instabilitas harga.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah komponen penting dalam menilai keberhasilan desentralisasi fiskal karena menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. PAD berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan sah lainnya (Kurniawan 2022). PAD menjadi cerminan sejauh mana suatu daerah mampu mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pusat. Pasaribu (2025) menyatakan bahwa peningkatan PAD mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi lokal secara optimal. Selain itu, dominasi PAD terhadap total pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah sebagaimana ditunjukkan oleh Sari et al. (2019). Untuk mengukur kontribusi PAD terhadap kemandirian fiskal, digunakan indikator Rasio *Local Fiscal Autonomy* (LFA). Semakin tinggi LFA, semakin besar kontribusi PAD terhadap total

pendapatan daerah, yang berarti semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya (Pasaribu 2025). Sebaliknya, untuk mengukur ketergantungan daerah terhadap pusat digunakan Rasio *Local Dependence on Fiscal Transfer*.

Wahyudin (2020) menyebutkan bahwa semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap dana pusat dan semakin rendah tingkat kemandiriannya. Dalam perspektif ekonomi makro, Hendri (2020) menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja dan pengurangan pajak karena akan memicu efek multiplier melalui tambahan permintaan. Studi Panjiatan et al. (2025) di Kota Pematangsiantar menunjukkan bahwa retribusi sebagai bagian dari PAD memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap inflasi, yang menegaskan bahwa pengelolaan PAD yang baik dapat menciptakan stabilitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, PAD yang kuat dapat menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sudut pandang teoritis, hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi juga ditegaskan oleh Amin (2015) melalui Teori Perspektif Baru (*New Perspective Theory*), yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal dari pusat ke daerah mampu meningkatkan efektivitas belanja publik dan memperbaiki kinerja ekonomi. Ia juga menekankan bahwa perubahan komposisi belanja pemerintah daerah dapat memengaruhi permintaan agregat, di mana peningkatan belanja akan mendorong konsumsi dan investasi serta memicu pertumbuhan ekonomi.

Dalam pandangan Keynesian, belanja dan pajak daerah menjadi instrumen penting dalam memengaruhi siklus ekonomi melalui efek multiplier. Zulkipli (2017) menambahkan bahwa desentralisasi terdiri atas dimensi politik, administratif, dan fiskal yang secara sinergis mendukung respons kebijakan berbasis lokal. Khamdana (2016), mengutip Tiebout (1956) dan Klugman (2013), menyatakan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal sehingga pelimpahan fiskal kepada daerah akan meningkatkan efisiensi penyediaan barang dan jasa publik.

Penelitian terbaru semakin menekankan pentingnya konteks kelembagaan dan kapasitas fiskal dalam mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal. Cai et al. (2025) menemukan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah secara signifikan ditentukan oleh kemampuan pengelolaan fiskal dan kualitas tata kelola. Song, Sun, and Gao (2025) menekankan bahwa besaran dan efektivitas penggunaan transfer fiskal memiliki korelasi kuat terhadap kinerja pembangunan daerah.

Yüksel and Songur (2025) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan optimal jika diikuti efisiensi belanja dan peningkatan PAD. Muhlisin, Subroto, and Sakti (2025) menyatakan bahwa desentralisasi juga memperkuat stabilitas makroekonomi daerah, terutama jika sistem akuntabilitas fiskal berjalan baik. Sementara itu, Herianti and Marundha (2024) menjelaskan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi bersifat interaktif, di mana kapasitas kelembagaan lokal menjadi faktor kunci yang memperkuat atau justru melemahkan dampaknya.

Dengan merujuk pada teori dan temuan-temuan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal—baik melalui optimalisasi PAD maupun pemanfaatan dana

transfer pusat—memiliki hubungan erat dengan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaruh variabel-variabel fiskal seperti DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk memahami efektivitas kebijakan fiskal di tingkat regional, khususnya di Pulau Jawa yang merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional namun tetap memiliki disparitas antarprovinsi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel untuk mengkaji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah Pulau Jawa. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, yang mencakup periode tahun 2017 hingga 2024. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 6 provinsi di Pulau Jawa, yaitu: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur melalui indikator Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara pertumbuhan ekonomi daerah diukur menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

**Tabel 1.** Definisi Operasional Variabel

Variabel	Jenis	Satuan	Indikator	Sumber	Transformasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Dependen	Persen (%)	Pertumbuhan tahunan PDRB atas dasar harga konstan	BPS Provinsi & Pusat	Tidak ditransformasi
Dana Bagi Hasil (DBH)	Independen	Miliar Rupiah	Jumlah dana bagi hasil yang diterima provinsi dari pemerintah pusat	DJPK Kemenkeu & BPS	ln(DBH)
Dana Alokasi Umum (DAU)	Independen	Miliar Rupiah	Jumlah dana alokasi umum dari pemerintah pusat ke provinsi	DJPK Kemenkeu	ln(DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Independen	Miliar Rupiah	Jumlah dana alokasi khusus yang diterima provinsi	DJPK Kemenkeu	ln(DAK)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Independen	Miliar Rupiah	Total PAD masing-masing provinsi	BPS Provinsi & LKPD	ln(PAD)

Sumber: BPS Indonesia (2024)

Model matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 \ln(DBH_{it}) + \beta_2 \ln(DAU_{it}) + \beta_3 \ln(DAK_{it}) + \beta_4 \ln(PAD_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Penelitian menggunakan analisis regresi data panel pada perangkat lunak Stata17, yaitu metode statistik yang menggabungkan data cross-section dan time series. Teknik ini unggul karena mampu menangkap dinamika antar waktu sekaligus mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar unit analisis. Menurut Amaliah et al. (2020) Terdapat tiga pendekatan utama dalam regresi data panel:

1. *Pooled Least Square (PLS)*

Menggabungkan seluruh data tanpa membedakan karakteristik individu atau waktu. Model ini mengasumsikan perilaku yang sama antar unit sepanjang waktu dan identik dengan regresi OLS. Meski sederhana, PLS tidak menangkap variasi individual dan temporal.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Mengakomodasi perbedaan karakteristik tetap antar unit dengan memasukkan variabel dummy. Model ini tepat ketika ada faktor unik yang tetap dalam tiap unit analisis dan berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. *Random Effect Model (REM)*

Mengasumsikan variasi antar unit bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Cocok digunakan jika unit analisis merupakan sampel dari populasi besar dan dipilih secara acak.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan analisis regresi data panel untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat diinterpretasikan secara ekonomis. Tahap pertama adalah pemilihan model terbaik dari tiga pendekatan utama, yaitu *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow untuk membandingkan PLS dan FEM, serta uji Hausman untuk menentukan antara FEM dan REM. Jika hasil uji Hausman signifikan ( $p\text{-value} < 0,05$ ), maka FEM digunakan; jika tidak, REM dipilih karena lebih efisien.

Setelah model ditentukan, dilakukan uji asumsi klasik, seperti uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap asumsi dasar regresi. Tahap akhir adalah estimasi dan interpretasi hasil, yang menunjukkan pengaruh desentralisasi fiskal (DAU, DAK, PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau Jawa. Koefisien regresi dan nilai signifikansi digunakan untuk menilai kekuatan dan arah pengaruh, yang kemudian diinterpretasikan sebagai dasar rekomendasi kebijakan fiskal yang efektif antar provinsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis regresi data panel, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan model panel terbaik yang akan digunakan, yaitu *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, atau *Random Effect Model (REM)*.

**Tabel 2.** Uji Pemilihan Model

Jenis Uji	Nilai Prob.	Keputusan
Uji Chow	0,8749	<i>Pooled Least Square</i> (karena p-value < 0,05)
Uji Lagrange Multiplier (LM)	1,0000	<i>Pooled Least Square</i> ((karena p-value < 0,05)

Sumber: Data Penelitian (2025)

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,8749 ( $> 0,05$ ), yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara model Fixed Effect dan Pooled Least Square. Dengan demikian, model Pooled Least Square (PLS) dianggap lebih tepat digunakan daripada Fixed Effect Model. Selanjutnya, hasil uji Lagrange Multiplier (LM) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 1,0000 ( $> 0,05$ ), yang berarti bahwa tidak terdapat keunggulan signifikan dari model Random Effect dibandingkan dengan Pooled Least Square. Oleh karena itu, model Random Effect juga tidak layak digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian, model regresi data panel yang paling sesuai adalah Pooled Least Square (PLS), karena model ini paling efisien dan sesuai dengan karakteristik data. Sebelum model ini diinterpretasikan lebih lanjut, dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik seperti heteroskedastisitas dan multikolinearitas guna memastikan bahwa model yang digunakan telah memenuhi syarat kelayakan.

**Tabel 3.** Uji Multikolinearitas

	LOGDAU	LOGDAK	LOGDBH	LOGPAD
LOGDAU	1.0000	-	-	-
LOGDAK	0.4605	1.0000	-	-
LOGDBH	-0.3065	0.5304	1.0000	-
LOGPAD	-0.0943	0.6793	0.7488	1.0000

Sumber: Data Penelitian (2025)

Berdasarkan hasil korelasi di atas, semua nilai berada di bawah 0,80. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen, dan model layak untuk digunakan dalam estimasi regresi panel lanjutan.

**Tabel 4.** Uji Heterokedastisitas

Jenis Uji	Nilai Chi <sup>2</sup>	Probabilitas	Keputusan
Breusch–Pagan (hetttest)	13.80	0.0002	Terdapat heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian (2025)

Nilai probabilitas sebesar 0.0000 ( $< 0,05$ ) menunjukkan bahwa model mengalami masalah heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan model dengan menggunakan *robust standard error* agar hasil estimasi tetap valid dan tidak bias.

**Tabel 5.** Uji t (Parsial) Hasil Estimasi REM

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.	Keterangan
LOGDBH	-1.279414	-1.56	0.100	Berpengaruh**
LOGDAU	0.3142084	0.64	0.522	Berpengaruh**
LOGDAK	-1.965708	-6.28	0.000	Tidak Berpengaruh
LOGPAD	3.112668	3.13	0.002	Berpengaruh*
Konstanta	-2.390123	-1.02	0.309	Berpengaruh*

\* Berpengaruh pada alpha 5%

\*\* Berpengaruh pada alpha  
10%

Sumber: Data Penelitian (2025)

Variabel LOGDAK (Dana Alokasi Khusus) memiliki koefisien sebesar -1.965708 dan nilai probabilitas 0.000, yang berarti berpengaruh signifikan pada taraf 5%. Koefisien negatif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan DAK justru berkorelasi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa penyaluran atau pemanfaatan DAK belum berjalan efektif dalam mendorong sektor-sektor produktif di daerah. Bisa jadi, DAK lebih banyak terserap dalam belanja yang tidak berdampak langsung terhadap PDRB.

Variabel LOGPAD (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan koefisien positif sebesar 3.112668 dengan nilai probabilitas 0.002, yang juga berarti berpengaruh signifikan pada taraf 5%. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar PAD, maka semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah dalam menggerakkan pembangunan ekonomi lokal, karena PAD mencerminkan kapasitas pendapatan yang dikendalikan langsung oleh pemerintah daerah.

Variabel LOGDBH (Dana Bagi Hasil) memiliki koefisien -1.279414 dengan nilai probabilitas 0.120, yang berarti tidak signifikan pada taraf 10%. Meskipun arah koefisien negatif menunjukkan potensi hubungan terbalik antara DBH dan pertumbuhan ekonomi, namun secara statistik pengaruh tersebut belum cukup kuat. Hal ini bisa terjadi karena realisasi DBH lebih sering digunakan untuk belanja rutin atau tidak diarahkan secara optimal untuk kegiatan produktif di daerah.

Variabel LOGDAU (Dana Alokasi Umum) memiliki koefisien 0.3142084 dengan nilai probabilitas 0.522, yang juga berarti tidak signifikan pada taraf 10%. Artinya, meskipun arahnya positif, secara statistik kontribusi DAU terhadap pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat. Ini bisa disebabkan oleh penggunaan DAU yang umumnya bersifat belanja rutin dan operasional, bukan investasi produktif.

Sementara itu, konstanta model memiliki nilai  $-2.390123$  dan nilai probabilitas  $0.309$ , yang juga tidak signifikan. Konstanta ini sekadar menggambarkan nilai rata-rata PDRB saat semua variabel independen bernilai nol, namun tidak cukup bermakna secara ekonometrik.

**Tabel 6.** Uji F (Simultan)

Statistik Uji	Nilai	Probabilitas	Keterangan
Wald $\chi^2(5)$	934.46	0.0000	Model signifikan secara simultan ( $\alpha = 5\%$ )

Sumber: Data Penelitian (2025)

Berdasarkan hasil estimasi model Random Effect, nilai Wald Chi-Square sebesar  $934,46$  dengan nilai probabilitas  $0,0000$  ( $< 0,05$ ) menunjukkan bahwa secara simultan, keempat variabel desentralisasi fiskal yang digunakan dalam model—yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)—secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Artinya, meskipun tidak semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial, namun secara agregat, keempat indikator fiskal tersebut mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan cukup baik selama periode 2017–2024.

**Tabel 7.** Koefisien Determinan

Jenis R-squared	Nilai	Interpretasi
Within	0.1419	14,19% variasi PDRB dijelaskan oleh variabel independen dalam provinsi sepanjang waktu.
Between	0.1372	13,72% variasi PDRB dijelaskan oleh perbedaan antar provinsi dalam model.
Overall	0.1274	12,74% variasi total PDRB dijelaskan oleh seluruh variabel dalam model.

Sumber: Data Penelitian (2025)

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model Pooled Least Square (PLS) atau Common Effect Model (CEM), diperoleh nilai R-squared Within sebesar  $0,1419$ , Between sebesar  $0,1372$ , dan Overall sebesar  $0,1274$ . Artinya, model ini secara keseluruhan hanya mampu menjelaskan sekitar  $12,74\%$  variasi laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) antarprovinsi dan antarwaktu di Pulau Jawa yang disebabkan oleh perubahan variabel Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Nilai R-squared yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi pertumbuhan ekonomi daerah masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel desentralisasi fiskal yang digunakan dalam model ini. Hal ini sejalan dengan karakteristik model PLS yang tidak mempertimbangkan efek individual spesifik antarprovinsi maupun variasi waktu secara eksplisit. Oleh karena itu, model PLS cenderung memiliki kekuatan

prediksi yang lebih terbatas dibandingkan model panel yang mempertimbangkan efek tetap atau acak, seperti Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM).

Meskipun demikian, hasil ini tetap memberikan dasar awal yang relevan untuk menilai pengaruh fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menjadi pijakan untuk pengembangan model lanjutan yang lebih kompleks guna menangkap variasi antarwilayah secara lebih komprehensif.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Dana Alokasi Khusus (LOGDAK) menunjukkan koefisien sebesar -1.965708 dan nilai probabilitas 0.000, yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Artinya, peningkatan alokasi DAK justru berkorelasi dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun DAK bertujuan untuk mendanai program-program prioritas nasional di tingkat daerah (Kuniawaty et al., 2022), implementasinya belum secara optimal mendukung aktivitas ekonomi produktif. DAK bersifat *earmarked*, yaitu penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan cenderung kurang fleksibel. Akibatnya, jika tidak sesuai dengan kebutuhan daerah atau tidak dieksekusi dengan efektif, DAK dapat terserap pada kegiatan yang kurang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pasaribu (2025) juga menyoroti potensi inefisiensi dalam penggunaan dana transfer khusus apabila tidak disertai dengan kapasitas kelembagaan yang memadai di tingkat daerah. Hal ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang ditransfer, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dimanfaatkan secara strategis dan produktif.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Variabel Pendapatan Asli Daerah (LOGPAD) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada taraf 5%, dengan koefisien sebesar 3.112668 dan probabilitas 0.002. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD secara nyata mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau Jawa.

PAD berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya (Kurniawaty et al., 2022). Tingginya kontribusi PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali serta mengelola potensi ekonomi local (Sari et al. 2019). Temuan ini selaras dengan konsep Local Fiscal Autonomy (LFA), di mana semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat otonomi dan efektivitas fiskal suatu daerah (Pasaribu 2025).

Dalam konteks Pulau Jawa, yang secara ekonomi lebih maju dibandingkan wilayah lain di Indonesia, kemampuan daerah dalam memanfaatkan PAD untuk investasi

pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor produktif lainnya menjadi faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi regional.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (LOGDBH) memiliki koefisien sebesar -1.279414 dengan nilai probabilitas 0.100, yang berarti berpengaruh signifikan pada taraf 10%, namun tidak pada taraf 5%.

Meskipun DBH dirancang untuk menciptakan keadilan fiskal antarwilayah dengan mendistribusikan pendapatan dari sumber daya nasional seperti pajak dan SDA kepada daerah penghasil maupun non-penghasil (Kurniawaty et al., 2022), koefisien negatif dalam model ini menunjukkan adanya potensi ketidakefisienan dalam pemanfaatannya.

wulandari & Emy Iryanie (2024) menyebut bahwa DBH seringkali diarahkan untuk belanja rutin dan tidak selalu digunakan untuk pembangunan sektor-sektor yang produktif. Wahyudin (2020) juga menambahkan bahwa tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dapat mengurangi inisiatif daerah dalam meningkatkan PAD, sehingga DBH yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan output ekonomi daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa DBH perlu dikelola lebih efektif agar tidak hanya menjadi instrumen redistribusi, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Variabel Dana Alokasi Umum (LOGDAU) memiliki koefisien positif sebesar 0.3142084 namun dengan nilai probabilitas 0.522, yang berarti tidak signifikan pada taraf 10% maupun 5%.

DAU merupakan transfer bersifat block grant, yang seharusnya meningkatkan kapasitas keuangan dan fleksibilitas daerah (Kurniawan 2022). Namun, hasil ini mengindikasikan bahwa DAU belum mampu menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Fahira (2021) mencatat bahwa DAU banyak digunakan untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin pemerintahan, bukan untuk pembangunan infrastruktur atau investasi produktif. Akibatnya, meskipun DAU cukup besar secara nominal, dampaknya terhadap peningkatan PDRB menjadi kurang signifikan. Selain itu, daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap DAU cenderung mengalami stagnasi fiskal karena minimnya insentif untuk meningkatkan PAD.

### **Tinjauan Komprehensif terhadap Desentralisasi Fiskal**

Kurniawan (2022) menyebutkan bahwa desentralisasi terdiri atas dimensi politik, administratif, dan fiskal. Artinya, tata kelola daerah, akuntabilitas, serta kapabilitas pemerintah daerah dalam merancang program pembangunan menjadi kunci sukses desentralisasi. Khamdana (2016) juga menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman lebih baik atas kebutuhan masyarakatnya, sehingga pelimpahan fiskal seharusnya dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang dan jasa publik.

Temuan-temuan dalam penelitian ini sejalan dengan literatur terkini yang menekankan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dana yang ditransfer, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah. Cai et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas fiskal suatu daerah sangat bergantung pada tata kelola keuangan dan kapasitas birokrasi, yang berperan penting dalam mengoptimalkan pengaruh dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks pemanfaatan DAK yang justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini mengindikasikan permasalahan dalam *earmarking* dan penyesuaian alokasi dengan kebutuhan riil daerah. Song et al. (2025) menegaskan bahwa penggunaan DAK yang tidak adaptif terhadap kebutuhan lokal cenderung berujung pada alokasi tidak produktif yang hanya memenuhi kewajiban administratif. Kondisi ini sangat relevan dengan temuan bahwa DAK memiliki korelasi negatif dengan PDRB.

Sementara itu, temuan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi memperkuat hasil Yüksel & Songur (2025), yang menggarisbawahi pentingnya penguatan pendapatan asli daerah sebagai penanda efektivitas desentralisasi. Peningkatan PAD secara strategis mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur dan sosial yang berdampak langsung terhadap output ekonomi.

Lebih lanjut, peran DBH dan DAU yang tidak signifikan atau negatif terhadap pertumbuhan menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas transfer fiskal umum. Muhlisin et al. (2025) menekankan bahwa desentralisasi fiskal tidak akan efektif tanpa sistem akuntabilitas yang kuat dalam penggunaan dana transfer. Dalam banyak kasus, seperti yang disoroti oleh Herianti & Marundha (2024), besarnya transfer fiskal tidak otomatis mendorong pertumbuhan jika institusi lokal tidak mampu menyerap dan mengelola dana secara tepat sasaran.

Dengan demikian, hasil ini tidak hanya menegaskan pentingnya aspek kuantitatif dalam transfer fiskal, tetapi juga menekankan dimensi institusional dan kualitas tata kelola dalam mendukung peran desentralisasi fiskal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, hasil temuan ini memberikan rekomendasi penting bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan PAD sebagai indikator kemandirian fiskal, serta mereformulasi skema transfer seperti DAK dan DAU agar lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang berdampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan Pooled Least Square (PLS), penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2017–2024. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menandakan bahwa kemandirian fiskal daerah sangat penting dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal. Sebaliknya, Dana Alokasi

Khusus (DAK) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, mengindikasikan bahwa alokasi dana yang tidak tepat sasaran atau kurang fleksibel dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), meskipun menunjukkan arah hubungan tertentu, tidak signifikan secara statistik dalam model ini. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal daerah tidak hanya bergantung pada besarnya transfer dana dari pusat, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan dan penyesuaian kebijakan terhadap kebutuhan spesifik tiap daerah.

### Saran

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah pusat perlu meninjau kembali kebijakan earmarking DAK agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan sektoral spesifik di setiap daerah. Alokasi DAK sebaiknya berbasis pada proposal daerah yang berorientasi hasil, bukan sekadar pemenuhan format administratif.

Pemerintah daerah harus didorong untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui digitalisasi layanan perpajakan daerah, penguatan database wajib pajak, dan pemutakhiran regulasi retribusi agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal. Pemerintah pusat perlu menerapkan sistem evaluasi berbasis output dalam alokasi DBH dan DAU. Pemberian insentif tambahan kepada daerah dengan kinerja anggaran dan pembangunan terbaik bisa menjadi langkah untuk meningkatkan efektivitas transfer fiskal umum.

Dibutuhkan program pembinaan berkelanjutan terkait manajemen fiskal dan perencanaan pembangunan berbasis data bagi aparat daerah. Penguatan SDM dan sistem penganggaran menjadi kunci untuk menyerap dana transfer secara optimal. Pemerintah pusat dapat mengembangkan indeks kuantitatif untuk mengukur seberapa efektif instrumen fiskal digunakan oleh masing-masing provinsi/kabupaten. Indeks ini bisa menjadi dasar penyesuaian besaran transfer fiskal berbasis kinerja dan hasil, bukan hanya formula tetap.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Eka Nur, Darnah Darnah, And Sifriyani Sifriyani. 2020. “Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (Cem), Fixed Effect Model (Fem) Dan Random Effect Model (Rem) (Studi Kasus: Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur Tahun 2015-2018).” *Estimasi: Journal Of Statistics And Its Application* 1 (2): 106. <https://doi.org/10.20956/Ejsa.V1i2.10574>.
- Amin, Nurul. 2015. “Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi.” *Proceedings Of The National Academy Of Sciences* 3 (1): 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/J.Bpj.2015.06.056%0ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/J.Str.2013.02.005%0ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Appirachman, Rozzy, Didi Suwardi, And Abdul Hadi Ilman. 2017. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Inflasi Di Propinsi Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal*

- Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 2 (2): 53–61. <https://doi.org/10.37673/Jebi.V2i2.4>.
- Cai, Zhongyao, Xuhui Ding, Ziqian Zhou, Aixi Han, Siqi Yu, Xinyu Yang, And Ping Jiang. 2025. “Fiscal Decentralization’s Impact On Carbon Emissions And Its Interactions With Environmental Regulations, Economic Development, And Industrialization: Evidence From 288 Cities In China.” *Environmental Impact Assessment Review* 110 (September 2024): 107681. <https://doi.org/10.1016/J.Eiar.2024.107681>.
- Fahira, Afia Maulina Mustafa Alkamal Nabilla Salsa. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*. 5 (2): 523–31. <https://doi.org/10.52362/Jisamar.V5i2>.
- Fisher, Ronald C. 2023. *State And Local Public Finance, Fifth Edition*. Routledge.
- Hambani, Cindriyanti Susy, And Saepul Anwar. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat.” *Jambura Economic Education Journal* 3 (2): 85–92. <https://doi.org/10.37479/Jeej.V3i2.10985>.
- Hendri, Wira. 2020. “Kajian Desentralisasi Fiskal Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4 (2). <https://doi.org/10.58258/Jisip.V4i2.1092>.
- Herianti, Eva, And Amor Marundha. 2024. “Examining The Effects Of Fiscal Decentralization And Income Inequality On The Economic Performance Of West Sumatra Province, Indonesia.” *Global Business And Finance Review* 29 (7): 63–77. <https://doi.org/10.17549/Gbfr.2024.29.7.63>.
- Khamdana, Abdillah. 2016. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia 2008-2012.” *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik Indonesian Treasury Review Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 1 (1): 23–38.
- Klugman, Jeni. 2013. “Decentralisation: A Survey Of Literature From A Human Development Perspective.” *Ssrn Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/Ssrn.2294658>.
- Kumalasari, Eva Nur. 2025. “The Effect Of Fiscal Decentralization On Economic Growth : An Empirical Study Of Regencies / Cities In Riau Province” 1 (2): 51–62.
- Kurniawan, A. 2022. “Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13 (3): 59–76.
- Kurniawaty, Cecillia, Lastuti Abubakar, And Mohamad Akyas. 2022. “Kepastian Hukum Penundaan Pembayaran Bphtb Dalam Ayda Lelang Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan

- Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An* 6 (1): 15–32. <https://doi.org/10.23920/Acta.V6i1.912>.
- Kusuma, Hendra. 2016. “Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9 (1): 1–3.
- Lestari, Agusalm. 2016. “Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pedapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia.” *Kinerja* 20, No.1:53–68.
- Muhlisin, Waspodo Tjipto Subroto, And Norida Canda Sakti. 2025. “How Impact Fiscal Decentralization To Sectoral Change And Local Inequality?” *International Journal Of Sustainable Development And Planning* 20 (1): 379–89. <https://doi.org/10.18280/Ijsdp.200134>.
- Panjiatan, Pauer, Darwin Damanik, Ahmad Ashadi, Angelita Demak Purba, Khairunnisak, And Damanik Mayasar Wisya. 2025. “Pengaruh Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Simalungun.” *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4 (2): 1640–44.
- Pasaribu, Sandi H. 2025. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.” *International Journal Of Economy, Education And Entrepreneurship (Ije3)* 2 (1): 378–84. <https://doi.org/10.53067/Ije3.V4i1.233>.
- Priyono, Dimas, And Herniwati Retno Handayani. 2021. “Analisis Pengaruh Pdrb, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 - 2018.” *Diponegoro Journal Of Economics* 10 (2): 1–10.
- Rengga Viano Deris, L. ., Bhinadi, A. ., & Nuryadin, D. . (2022). Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (34 Provinsi) Tahun 2015-2020. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2947–2958. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.481>
- Sari, Purnama, Isep Saepul Muzaki, Nurdiana Mulyatini, Eva Faridah, And Benny Prawiranegara. 2019. “Local Own Revenue , Decentralization And Local Financial Independent.” *Jurnal Manajemen Indonesia* 19 (3): 250–59. <https://doi.org/10.25124/Jmi.V19i3.2413>.
- Song, Jiaying, Xiao Sun, And Chuansheng Gao. 2025. “Do Public Services Affect Economic Growth? Evidence From China Under The Fiscal Decentralization Perspective.” *International Review Of Economics And Finance* 102 (January 2024): 104378. <https://doi.org/10.1016/J.Iref.2025.104378>.
- Suprianik, Suprianik. 2023. “Analysis Of The Impact Of Fiscal Decentralization On Economic Growth In Indonesia.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5 (1): 433–42. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V5i1.2109>.
- Tiebout, Charles M. 2021. “A Pure Theory Of Local Expenditures.” *The Journal Of Political Economy* Is Currently Published By The University Of Chicago Press. 64 (5): 416–24.
- Wahyudin, Ihsan. 2020. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat.” *Indonesian Accounting Research Journal* 1 (1): 86–97.

- Wulandari, Phaureula Artha, And Emy Iryanie. 2024. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Patriot*. Vol. 6. <https://doi.org/10.24036/Patriot.V6i2.1052>.
- Yüksel, Cihan, And Mehmet Songur. 2025. “The Effect Of Local Fiscal Variables On Local Economic Growth Intürkiye.” *Transylvanian Review Of Administrative Sciences* 2025 (74): 172–89. <https://doi.org/10.24193/Tras.74e.9>.